



Dinas Perdagangan, Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah  
Kab. Kep. Selayar

# LAKIP

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2023

Jl. K.H. Dewantara No. 18

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Semoga Laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEPALA DINAS



**LANDI ABDURRAHMAN, SE., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Sistem manajemen pemerintahan sudah harus berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dalam peningkatan akuntabilitas, setiap rencana kinerja didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat, dan mampu merespon setiap isu permasalahan strategis yang muncul, serta anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 telah ditetapkan 8 (delapan) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub kegiatan yang diwujudkan melalui penetapan kinerja yang dilaksanakan dan harus dicapai dalam tahun 2023 oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dari hasil laporan pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan pencapaian target kegiatan di akhir tahun 2023 dengan realisasi sebesar 94,63 %.

Pengukuran kinerja organisasi dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatkan dan Pengembangan UMKM yang berkualitas dengan pemberian bantuan peralatan, pelatihan, sosialisasi dan workshop kepada para pelaku usaha agar mampu mengembangkan hasil produksinya dan pendapatan para pelaku juga meningkat, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar dengan melaksanakan pemantauan fasilitas perdagangan yang telah ada dan mengidentifikasi fasilitas perdagangan yang belum memenuhi standar.



## DAFTAR TABEL

Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 .....	21
Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 .....	25
Tabel Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	27
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	46
Pengukuran Kinerja Tahun 2021 .....	49
Tabel Target dan Realisasi Kinerja .....	50
Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja Capaian Tahun ini dengan Tahun lalu....	51
Tabel Jumlah Koperasi dan BPR tahun 2018-2023.....	56
Tabel Pengadaan Peralatan.....	57
Tabel Realisasi Keuangan Tahun 2023 .....	62



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL (HALAMAN JUDUL)</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambar Umum Organisasi Perangkat Daerah .....	2
D. Isu-Isu Strategis .....	13
<b>BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	19
B. Indikator Kinerja Utama .....	25
C. Rencana Kerja Tahunan .....	27
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	45
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Kinerja .....	49
B. Analisis Capaian Kinerja .....	49
C. Realisasi Keuangan .....	62
<b>BAB. IV PENUTUP</b> .....	69
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	70



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya memandirikan Pemerintahan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta mengacu pada Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.



## **B. MAKSU DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

## **C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1. Kedudukan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.



Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati Kepulauan Selayar dalam merumuskan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;



- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dari kelemahan – kelemahan diatas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengimbangi dengan kelebihan atau kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu :

- 1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
- 2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- 3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
- 4. Profesionalisme pegawai;

### **3. Sumber Daya**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 86 (Delapan Puluh Enam) orang Pegawai, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil, 58 (Lima Puluh Delapan) orang Pegawai Harian Lepas, Untuk lebih jelas ada pada data terlampir.



#### ✚ Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Dinas/Bidang/Seksi	Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1	Kepala Dinas	1 Org	-	-	1 Org
2	Sekretariat	1 Org	7 Org	1 Org	9 Org
3	Perdagangan	2 Org	7 Org	1 Org	10 Org
4	Koperasi dan UKM	1 Org	5 Org	-	6 Org
5	UPT Pengelolaan Pasar	-	2 Org	-	2 Org
	<b>Total</b>	<b>5 Org</b>	<b>21 Org</b>	<b>2 Org</b>	<b>28 Org</b>

#### ✚ Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Pendidikan	PNS	PHL	Jumlah
1	S2	9 Org	-	9 Org
2	S1	12 Org	24 Org	36 Org
3	D.III	1 Org	-	1 Org
4	D.II	-	3 Org	3 Org
5	SMA	6 Org	28 Org	34 Org
6	SD	-	3 Org	3 Org
	<b>Total</b>	<b>28 Org</b>	<b>58 Org</b>	<b>86 Org</b>

#### ✚ Data Pegawai Berdasarkan Diklat / Penjenjangan

No	Dinas/Bidang/Seksi	Diklat / Penjenjangan			Jumlah
		II	III	IV	
1	Kepala Dinas	1 Org	-	-	1 Orang
2	Sekretariat	-	1 Orang	1 Orang	2 Orang
3	Perdagangan	-	-	3 Orang	3 Orang
4	Koperasi dan UKM	-	1 Orang	3 Orang	4 Orang
	<b>Total</b>	<b>1 Orang</b>	<b>2 Orang</b>	<b>7 Orang</b>	<b>10 Orang</b>

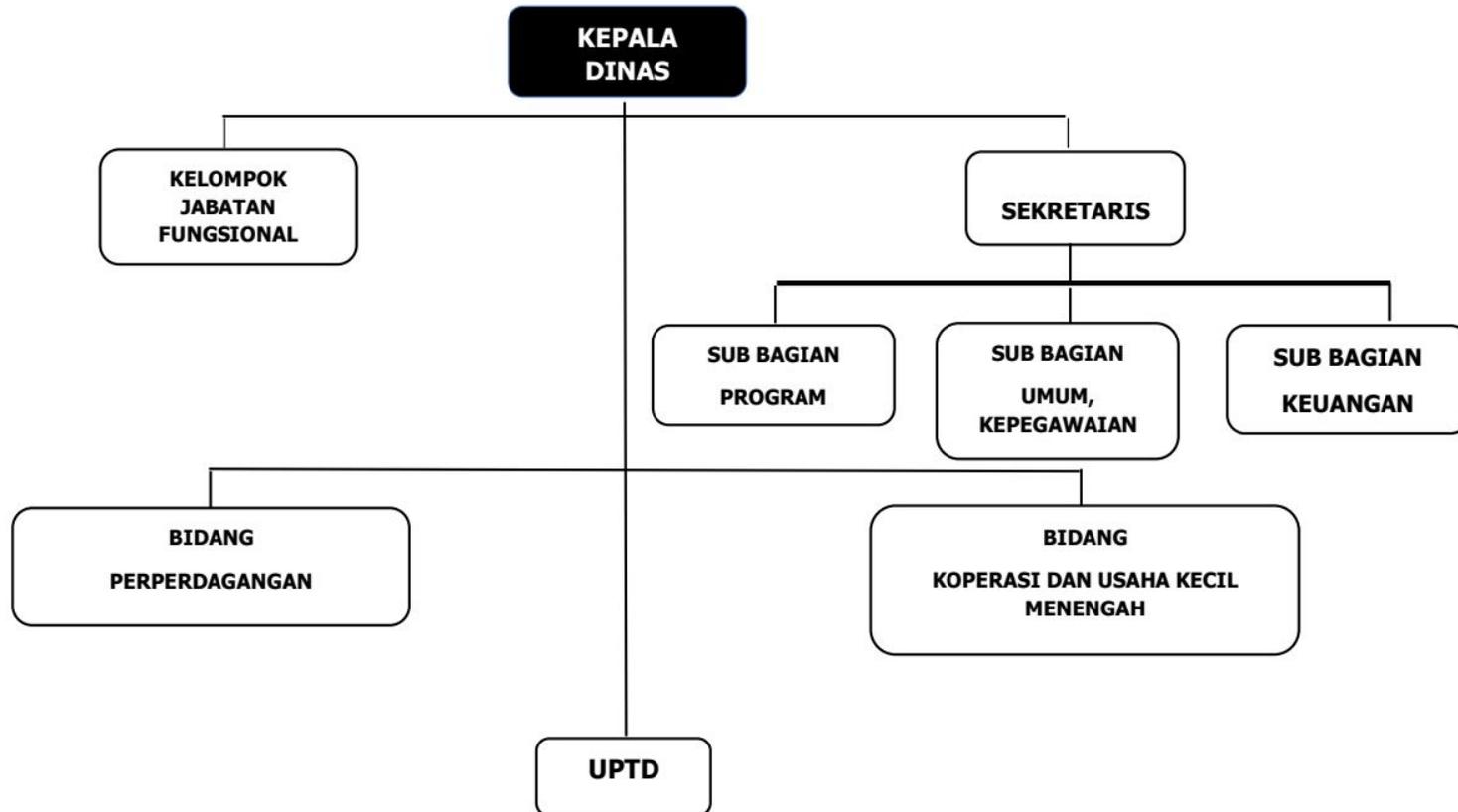
**b. Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sarana dan prasarana berdasarkan data per bulan Desember 2023 sebagaimana berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>Jumah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Komputer	15	Unit	Baik
2	Laptop	42	Unit	Baik
3	Notebook	8	Unit	Baik
4	Printer	16	Unit	Baik
5	Scanner	1	Unit	Baik
6	Sepeda Motor	24	Unit	Baik
7	Mesin Las Listrik	1	Unit	Baik
8	Mesin Pompa Air	3	Unit	Baik
9	Termometer	1	Unit	Baik
10	Stopwastch	1	Unit	Baik
11	Tool Set	2	Unit	Baik
12	Landasan Cap Lengkap	2	Unit	Baik
13	Tang Plombir	4	Unit	Baik
14	Bejana Ukur	4	Unit	Baik
15	Timbangan Meja Kapasitas 10 KG	6	Unit	Baik
16	Anak Timbangan Miligram	3	Unit	Baik
17	Anak Timbangan Bidur	25	Unit	Baik
18	Lemari Besi	7	Unit	Baik
19	Lemari Kayu	2	Unit	Baik

20	Rak Kayu	1	Unit	Baik
21	Filling Cabinet Besi	2	Unit	Baik
22	Lemari Kaca	5	Unit	Baik
23	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
24	Meja Kerja Kayu	31	Unit	Baik
25	Kursi Besi	2	Unit	Baik
26	Kursi Rapat	120	Unit	Baik
27	Kursi Tamu	3	Unit	Baik
28	Kursi Putar	26	Unit	Baik
29	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Baik
30	Lemari Es	2	Unit	Baik
31	AC	18	Unit	Baik
32	TV	7	Unit	Baik
33	Loudspeaker	1	Unit	Baik
34	Soundsystem	1	Unit	Baik
35	Gordyin	3	Unit	Baik
36	Buffet Kayu	2	Unit	Baik
37	Buffet Kaca	6	Unit	Baik
38	Lemari Arsip	3	Unit	Baik
39	Proyektor	5	Unit	Baik
40	Kamera Digital	6	Unit	Baik
41	Faxmile	1	Unit	Baik
42	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	2	Unit	Baik
43	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2	Unit	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Lain	9	Unit	Baik

**Gambar 1.1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI**



#### **4. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LAKIP adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
2. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **5. Sistematika Penulisan**

LAKIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :



## **BAB. I PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang
- F. Maksud dan Tujuan
- G. Gambar Umum Organisasi Perangkat Daerah
- H. Isu-Isu Strategis

## **BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- E. Rencana Strategis
- F. Indikator Kinerja Utama
- G. Rencana Kerja Tahunan
- H. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

## **BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- D. Pengukuran Kinerja
- E. Analisis Capaian Kinerja
- F. Realisasi Keuangan

## **BAB. IV. PENUTUP**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### **6. Kinerja Pelayanan SKPD**

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di kategorikan pada 6 (enam) peran yang saling terkait, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;



2. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan dan Koperasi, usaha kecil dan menengah
3. Pembinaan secara kontinyu guna pengembangan UKM, pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan di kabupaten;
4. Pembinaan dan pengoordinasian perlindungan konsumen dan pengawasan barang-barang beredar serta pengkoordinasian dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
5. Pembinaan, koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, aparatur pembina serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.
6. Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan aparatur pembina serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.



## 7. Inovasi

	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	Gerakan Koperasi Pola Penerapan Sistem Pembelajaran Model Yang Berbasis Aktifasi Di Kabupaten Kepulauan Selayar (GERAI PELANSIN “ASSAMATURU”	Terciptanya model koperasi sebanyak 6 (enam) koperasi yang akan menjadi replikasi yang merupakan wujud pelaksanaan metode pembelajaran.	Terbentuknya koperasi model di 11 kecamatan	

Sampai saat ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar berbagai pelatihan bagi wirausaha pemula di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pelatihan lebih difokuskan pada bidang *digital marketing*, desain produk, dan penciptaan produk yang *market oriented*.

Dengan melihat berkembang pesatnya pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga harus diikuti dengan peningkatan ekonomi masyarakat lokal dengan melahirkan para wirausahawan yang kreatif dan inovatif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga mendorong pelaku usaha membentuk sebuah wadah koperasi yang mengatasi kebutuhan anggotanya. Salah satu inovasi yang digagas adalah membentuk koperasi model di setiap kecamatan sebagai model koperasi sehat yang menjadi rujukan pengelolaan koperasi lainnya.

Pada tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan *digital entrepreneurship academy* dengan peserta sebanyak 1.200 orang yang berfokus pada pengenalan ekonomi digital dan digitalisasi UMKM. Selain itu dilaksanakan juga pelatihan kewirausahaan, akuntansi, FGD, merek, labeling, dan mocaf dengan total peserta 321 orang pelaku



UMKM se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas UMKM, dengan mendatangkan para ahli sebagai instruktornya. Dalam pelaksanaannya, peserta bisa langsung praktek dengan didampingi instruktornya. Sehingga, para peserta dapat langsung melakukannya setelah selesai kegiatan, para pelaku wirausaha harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk memacu produktifitas dan meningkatkan efisiensi usaha. Selain itu, Pelaku usaha juga harus jeli dalam melihat dan menangkap peluang usaha yang muncul seiring berkembangnya teknologi informasi para wirausaha jangan cepat berpuas diri dan tidak lagi berpatokan hanya *product oriented*, tetapi harus *market oriented*. "Artinya, harus bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan pasar saat ini dan akan datang".

#### **D. ISU-ISU STRATEGIS**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa isu-isu strategis, antara lain:

##### **1. BIDANG PERDAGANGAN**

Isu-isu strategis bidang urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya disebabkan karena sampai saat ini belum ada sarana dan prasarana transportasi yang khusus mengangkut logistik dan komoditi hasil pertanian dan perikanan.
2. Belum adanya hasil komoditi asal Selayar yang berkategori ekspor yang dikirim ke Makassar ataupun ke Surabaya disebabkan belum adanya pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) barang, yang merupakan persyaratan untuk



dapat memasuki wilayah negara tujuan, dan SKA juga merupakan persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh negara tujuan. SKA diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan SKA atas barang Ekspor di Indonesia.

3. Ditutupnya sementara distribusi logistik peti kemas ke Surabaya dikarenakan belum maksimalnya komoditi perdagangan yang didistribusikan dari Surabaya ke Selayar karena sudah adanya hubungan dagang para pelaku usaha ke distributor Makassar.
4. Belum optimalnya hasil pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lainnya yang menyebabkan para pedagang masih memasok dari daerah lain untuk diperjual belikan di pasar.
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya yang berdampak kepada menurunnya omzet para pedagang serta menurunnya daya beli masyarakat pasca pandemi covid-19 dan dampak inflasi.
6. Belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengidentifikasi jumlah objek pungutan retribusi atas capaian yang tidak memenuhi target.
7. Adanya beberapa pasar yang dibangun namun sampai saat ini belum difungsikan/dimanfaatkan oleh karena para pedagang lebih menyukai hamparan dibanding los dan kios dalam bangunan gedung pasar yang telah dibangun.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2023, adalah sebagai berikut :



1. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan dan barang penting lainnya yang efektif dan efisien, disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM.
2. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya. padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
3. Volume arus barang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Selayar masih sedikit sehingga belum efektif dan efisien untuk dilakukan pengiriman barang melalui container

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Memaksimalkan produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai komoditi unggulan daerah.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, meminimalisir ketidakpastian, dan memproses pembelian harus mudah dan cepat.

## **2. BIDANG KOPERASI DAN UKM**

Koperasi sebagai salah satu bentuk Ekonomi Industri yang sangat penting karena keberadaannya di dukung oleh pemerintah dan sudah memasyarakat. Namun masalah yang dihadapi adalah kualitas manajemen koperasi yang masih di laksanakan secara tradisional sehingga kurang mampu bersaing baik dengan swasta maupun dengan usaha asing. Oleh sebab itu untuk mengatasi kelemahan tersebut tersebut perlu diadakan repositioning yang lebih



menekankan pada aspek teknologi dan SDM (Brain Manajemen). Apalagi saat ini semua aktifitas lebih diarahkan kepada penanganan pemulihan ekonomi dampak pandemic covid-19, inflasi dan bencana el nino.

Jumlah pelaku usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebanyak 19.725 pelaku UMKM dari berbagai sektor. Potensi Sumber Daya Alam yang di miliki Kabupaten Kepulauan Selayar cukup lengkap dan beragam baik pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan maupun pariwisata yang dapat dikelola dan di kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun karena keterbatasan SDM maupun teknologi tepat guna sehingga belum mampu secara maksimal memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

Permasalahan strategisnya yaitu :

1. Permodalan adalah masalah UKM yang utama. Efeknya para pengusaha tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
2. Kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Banyak dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang, namun tidak memikirkan cara ekspansi bisnis apalagi mereka kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya dan usaha mereka pun hanya berjualan di tempat.
3. Kurangnya inovasi produk dalam hal meningkatkan daya saing bisnis. Para pengusaha seringkali di hadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produksinya.
4. Kesulitan dalam mendistribusikan produk karena selama ini kebanyakan pelaku UKM selalu kekurangan mitra dalam hal mendistribusikan produknya dan belum memanfaatkan/mengoptimalkan pemasaran online.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2023, adalah sebagai berikut :



1. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota.
2. Masih banyak Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya.
3. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah.
4. Kondisi ekonomi pasca pandemi covid-19 serta dampak inflasi.
5. Masih rendahnya pelaksanaan RAT.
6. Adanya tunggakan penerima bantuan
7. Kegiatan usaha tidak berjalan
8. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
9. Terbatasnya tenaga terampil

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat
2. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN;
3. Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.
4. Mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
5. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
6. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi
7. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya.
8. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif
9. Memaksimalkan PLUT sebagai layanan terpadu kepada koperasi dan UKM.



Data / Hal-hal lain yang dianggap perlu juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah :

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan : pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan'
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang ; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.
3. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa : kredit perbankan, pinjaaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya
4. Memfasilitasi kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keaagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

- **Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu **“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**.

**“Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”** mengandung dua pengertian kondisi, pertama sebagai Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkat/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Yang kedua sebagai Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (HUB) perdagangan barang/jasa, industri dan distribusi logistic yang mencakup Kabupaten/Kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

- **Misi**

Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- ❖ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan transparan.



- ❖ Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan.
- ❖ Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
- ❖ Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.
- ❖ Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
- ❖ Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diatas mengandung arti :

1. Perdagangan adalah meningkatkan daya saing daerah;
2. Koperasi adalah meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi;  
Usaha Kecil dan Menengah adalah menumbuhkembangkan UKM/Pedagang Kaki Lima sebagai ujung tombak perekonomian yang berbasis ekonomi dan kerakyatan.
3. Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen adalah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Tujuan dan Sasaran**

Dengan berlandaskan misi yang telah di tetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten, Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi Daerah
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
3. Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan potensi kemaritiman
5. Meningkatkan Aktualisasi nilai budaya
6. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup



Sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya daya beli masyarakat
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan
5. Terbangun dan berkembangnya Kawasan distribusi logistic (barang dan jasa)
6. Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan

Tabel 2.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah  
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Tahun 2021-2026

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Th. 2023
1	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritime Kawasan Timur Indonesia	Mengembangkan Tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan tranparan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi birokrasi perangkat daerah	70 (B)
					Nilai SAKIP perangkat daerah	70 (BB)
					Laporan Keuangan OPD sesuai Standar	sesuai



					Akuntansi Pemerintahan	
					Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	82 (B)
		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan kemandirian pelaku usaha	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha	Cakupan kemandirian pelaku usaha	12,75
					Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri	21,01
					Persentase Kemandirian UMK	4,50
		Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman	Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri	Meningkatnya potensi ketersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,91

				pengawasan perdagangan		
					Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar	62,5
					Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan	18
					Kecukupan Komoditas Perdagangan	100

- **Strategi Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- Optimalisasi peranan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola SDA menjadi produk yang bermutu yang mampu bersaing dalam pasar global.
- Pengembangan Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dalam mendukung perekonomian daerah.
- Peningkatan kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian Koperas dan UKM.
- Peningkatan Pasar produk dalam negeri.
- Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan.



- Perwujudan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab.
- Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran.
3. Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah.
4. Peningkatan kualitas manajemen asset daerah.
5. Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah.
6. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system.
7. Perbaikan dan penerapan system dan prosedur pelayanan public.
8. Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin.
9. Perbaikan income perkapita.
10. Pengendalian harga.
11. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita.
12. Pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah.
13. Peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata.
14. Peningkatan sadar wisata.
15. Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama pendukung kegiatan distribusi logistik pada Kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara pulau selayar).
16. Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.



## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 diadakan perubahan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. yang semula 6 urusan yakni, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Kemetrolagian, Urusan, Koperasi dan Urusan Usaha Kecil Menengah menjadi 2 urusan yakni Urusan Perdagangan dan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### TAHUN 2021-2026

Nama Organisasi	: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah</li><li>2. Pengendalian Kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah</li><li>3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.</li><li>4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.</li><li>5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>



No	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Urusan Bidang Perdagangan</b>						
I	Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan					
	a. Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar	56,25	62,5	68,75	75	81,25
	b. Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan	18	18,1	18	18	18
	c. Kecukupan Komoditas Perdagangan	100	100	100	100	100
<b>Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</b>						
II.	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha					
	a. Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri	18,84	21,01	22,46..	23,91	25,36
	b. Persentase Kemandirian UMK	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50
III.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah					
	a. Nilai SAKIP perangkat daerah	65 (B)	70 (B)	74(B)	78(B)	82
	b. Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

**KEPALA DINAS**

**ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005



### C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses mulai dari persiapan perencanaan kinerja, pelaksanaan koordinasi antara bidang-bidang di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, telaah dan evaluasi, sampai dengan penetapan anggaran yang diwujudkan didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

**Tabel 2.3.1**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023		
		Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan internal	Kab. Kep. Selayar	BB	6,414,538,881
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	100%	156,500,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	32,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	14,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	13,500,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	8,000,000



Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>8,000,000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPPD, Buku Profil)</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>43,000,000</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Money PK)</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>13 Dokumen</b>	<b>38,000,000</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>100%</b>	<b>4,330,500,000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>39 Orang</b>	<b>4,302,000,000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>13,500,000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<b>Jumlah SPJ Fungsional</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>12 laporan</b>	<b>8,000,000</b>
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<b>Jumlah Laporan RF-K</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>12 laporan</b>	<b>7,000,000</b>
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<b>Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>100%</b>	<b>8,000,000</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		<b>-</b>
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		<b>-</b>



Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Kep. Selayar	4 laporan	8,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset (BI, KIR, KIB, CIL)	Kab. Kep. Selayar		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	116,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Kep. Selayar		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (DUK, KGB, KP, KP4) yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	4 Dokumen	7,000,000
Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen evaluasi kinerja ASN (SKP, DP3) yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	10,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kep. Selayar	4 ASN	75,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Kab. Kep. Selayar	2 ASN	24,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Adminstras dan Operasional Perkantoran	Kab. Kep. Selayar	100%	692,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Kep. Selayar	70 Buah	195,000,000



Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan (spanduk) yang tersedia	Kab. Kep. Selayar	83 Buah	103,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Klipping Bahan bacaan Koran dan Buku Produk Hukum terkait perindag KUKM yang tersedia	Kab. Kep. Selayar	3 Buah	7,500,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dinas yang terfasilitasi	Kab. Kep. Selayar	500 orang	32,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Perindag KUKM yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	272 Laporan	355,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kab. Kep. Selayar	100%	423,000,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah motor dinas yang diadakan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	40,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	141,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang disediakan	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	103,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan halaman yang dibangun	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	115,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	24,000,000
Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD		Kab. Kep. Selayar		-



Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kab. Kep. Selayar		-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran</b>	Kab. Kep. Selayar	100	568,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Jumlah surat dinas yang terkirim</b>	Kab. Kep. Selayar	100 Buah	6,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Jumlah Layanan Telpon, Listrik dan Air yang tersedia</b>	Kab. Kep. Selayar	3 Buah	84,500,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Jumlah PHL sebagai pelayan umum Perindag KUKM</b>	Kab. Kep. Selayar	52 Orang	477,500,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah</b>	Kab. Kep. Selayar	100%	120,038,881
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara</b>	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	59,200,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Kep. Selayar		-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Jumlah Peralatan/Perlengkapan /Mesin yang terpelihara</b>	Kab. Kep. Selayar	10 Unit	16,500,000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Kab. Kep. Selayar		-
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Kab. Kep. Selayar		-



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>2 Unit</b>	<b>44,338,881</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		-
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	<b>Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>15</b>	<b>3,140,138,442</b>
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepulauan Selayar	<b>Persentase Perkembangan modal dan tenaga kerja</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>3,140,138,442</b>
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<b>Pembentukan Sentra IKM</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>12 Sentra</b>	<b>450,000,000</b>
Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	<b>Pendampingan Sentra</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>11 Sentra</b>	<b>240,138,442</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	<b>Pelatihan Pengolahan Industri dan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pelatihan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>16 Kali</b>	<b>450,000,000</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	<b>Bantuan Pengadaan Peralatan Sentra</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>11 Kecamatan</b>	<b>900,000,000</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	<b>studi kawasan IKM kerajinan dan kajian ekonomi pembangunan distribusi logistik teluk bone</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>2 IKM</b>	<b>600,000,000</b>



Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	<b>pameran Industri kreatif, deskranasda, hari jadi sulses dan pameran industri</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>4 Kali</b>	<b>500,000,000</b>
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	<b>Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>25</b>	<b>50,000,000</b>
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	<b>Persentase Izin Usaha Industri yang Dikeluarkan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>50,000,000</b>
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	<b>Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin usaha Industri</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>30,000,000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI	<b>kunker ke Dinas Perindustrian Takalar/ Jeneponto dan pelatihan pembuatan gerabah</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>20,000,000</b>



Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)				
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	<b>Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>100</b>	<b>50,000,000</b>
Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Rekomendasi Izin yang dikeluarkan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>50,000,000</b>
Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	<b>Jumlah IKM yang terdaftar, diolah dan dianalisis dalam sistem Informasi Industri secara Lengkap dan terkini</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>55 IKM</b>	<b>15,000,000</b>
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	<b>Jumlah IKM yang dipublikasikan data dan informasinya dalam SIINAS</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>55 IKM</b>	<b>15,000,000</b>
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	<b>Jumlah pelaku IKM yang evaluasi</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>100 IKM</b>	<b>20,000,000</b>
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN</b>				
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>60</b>	<b>101,369,000</b>
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	<b>Persentase peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>100%</b>	<b>101,369,000</b>



Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	<b>penerbitan surat rekomendasi perizinan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>101,369,000</b>
Penerbitan Tanda Daftar Gudang		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		-
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		-
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba dalam Negeri		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		-
Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan waralaba (STPW) dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		-
Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam Negeri		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		-
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		-
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		-
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan		<b>Kab. Kep. Selayar</b>		-



Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		Kab. Kep. Selayar		-
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2		Kab. Kep. Selayar		-
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Kab. Kep. Selayar		-
Penerbitan Surat Keterangan Asal ( bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Kab. Kep. Selayar		-
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Kab. Kep. Selayar		-
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Kab. Kep. Selayar	50	152,053,500
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan distribusi barang/jasa dan memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha dan buyer	Kab. Kep. Selayar	50	90,903,500
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Perencanaan Pembangunan Pasar dan Penyusunan Zona Kawasan Distribusi Logistik	Kab. Kep. Selayar	70	40,253,500
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	70	50,650,000



Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<b>Tata kelola sarana distribusi perdagangan semakin baik</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>90%</b>	<b>61,150,000</b>
Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>70</b>	<b>35,150,000</b>
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>26,000,000</b>
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting	<b>Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>60%</b>	<b>456,160,500</b>
Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah kabupaten/Kota	<b>Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>11 Kecamatan</b>	<b>151,000,000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	<b>Jumlah Kecamatan yang dipantau barang kebutuhan Pokok dan pentingnya</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>11 Kecamatan</b>	<b>50,400,000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Akseibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	<b>Jumlah Barang Kebutuhan Pokok yang ditingkatkan akseibilitasnya</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>11 Kecamatan</b>	<b>50,350,000</b>
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	<b>Jumlah Ketersediaan Stok Barang kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>11 Kecamatan</b>	<b>50,250,000</b>



Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<b>Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>1 Kabupaten</b>	<b>269,710,500</b>
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	<b>Terlaksananya pengendalian harga harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>117,000,000</b>
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritas dalam Sistem Informasi Perdagangan	<b>Jumlah barang yang dipantau dan terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>102,460,000</b>
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	<b>Persentase peningkatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>50,250,500</b>
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kelengkapan rekomendasi perizinan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>100%</b>	<b>35,450,000</b>
Pemeriksaan kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	<b>Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>15,150,000</b>
Pengawasamn Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	<b>Persentase peningkatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>10,100,000</b>
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisidan Bersubsidi	<b>Persentase peningkatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>10,200,000</b>
Program Pengembangan Ekspor	<b>Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>19</b>	<b>182,464,200</b>



Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	<b>Pengembangan dan peningkatan barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar</b>	Kab. Kep. Selayar	70	182,464,200
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/kota	<b>Persentase peningkatan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kep. Selayar	70	26,000,000
Pameran dagang Nasional	<b>Pameran Dagang Nasional</b>	Kab. Kep. Selayar	1 kali	30,614,200
Pameran Dagang Lokal	<b>Pameran Dagang Lokal</b>	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	25,200,000
Misi Dagang Bagi Ekpor Unggulan	<b>Peningkatan transaksi anatara pelaku usaha dengan pembeli (buyer)</b>	Kab. Kep. Selayar	70	50,250,000
Peningkatan Citra Produk Ekspor	<b>Peningkatan Citra Produk Ekspor</b>	Kab. Kep. Selayar	11 Kecamatan	25,200,000
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	<b>Persentase Peningkatan SDM Pelaku Usaha Ekspor</b>	Kab. Kep. Selayar	70	25,200,000
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (2)	<b>Persentase alat ukur yang ditera</b>	Kab. Kep. Selayar	12.04	425,749,800
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<b>Alat UTTP bertanda tera SAH yang berlaku</b>	Kab. Kep. Selayar	70	425,749,800
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	<b>Pengendalian Alat UTTP</b>	Kab. Kep. Selayar	650 Alat	162,249,800
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	<b>Alat UTTP yang layak pakai dan BDKT yang baik</b>	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	202,000,000
Penyidikan Metrologi Legal	<b>Alat standar yang tertelusur</b>	Kab. Kep. Selayar	70	61,500,000
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	<b>Persentase produk lokal yang dipasarkan</b>	Kab. Kep. Selayar	33	101,369,000



Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	<b>Peningkatan/pengembangan sistem distribusi barang/produk menjadi pusat perdagangan antar pulau</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>101,369,000</b>
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	<b>Persentase peningkatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>15,519,000</b>
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	<b>Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>15,500,000</b>
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	<b>Terupdatenya sistem informasi kebutuhan barang/produk melalui sistem jaringan informasi perdagangan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>70,350,000</b>
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	<b>Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>19.25%</b>	<b>10,000,000</b>
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Idalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>5,000,000</b>



Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pemabukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase peningkatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>5,000,000</b>
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>5,000,000</b>
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Presentase peningkatan Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>5,000,000</b>
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	<b>Persentase koperasi sehat</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>13.15</b>	<b>121,642,800</b>
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	<b>Tercapainya koperasi yang akuntabel</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>60</b>	<b>121,642,800</b>



Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, kemandirian , Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Koperasi yang berkualitas sehat</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>70,642,800</b>
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Meningkatnya kesadaran berkoperasi</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>51,000,000</b>
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	<b>Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>12.15</b>	<b>126,711,250</b>
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Koperasi yang Sehat organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>10 Koperasi</b>	<b>126,711,250</b>
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Jumlah koperasi yang Akuntabel</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>2 Koperasi</b>	<b>36,000,000</b>
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Jumlah koperasi yang ber-RAT</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>30 Koperasi</b>	<b>90,711,250</b>
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	<b>Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>11.51</b>	<b>172,327,300</b>
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>60 Koperasi</b>	<b>86,163,650</b>



	<b>keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</b>			
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	<b>Persentase koperasi yang ber RAT</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>162 Koperasi</b>	<b>86,163,650</b>
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>60 Koperasi</b>	<b>86,163,650</b>
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	<b>Persentase koperasi yang ber RAT</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>162 Koperasi</b>	<b>86,163,650</b>
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	<b>Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan(%)</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>85.50%</b>	<b>187,532,650</b>
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>6 Koperasi</b>	<b>187,532,650</b>
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Koperasi yang Naik Kelas</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>6 Koperasi</b>	<b>187,532,650</b>



Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	<b>Persentase UMKM yang Diberdayakan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>22.77%</b>	<b>598,214,000</b>
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<b>Pendapatan UMKM meningkat</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>30 UMKM</b>	<b>598,214,000</b>
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<b>Jumlah UMKM yang akurat</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>30 UMKM</b>	<b>98,214,000</b>
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	<b>Jumlah UMKM yang diberdayakan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>30 UMKM</b>	<b>150,000,000</b>
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<b>Jumlah sentra yang dikembangkan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>3 Sentra</b>	<b>120,000,000</b>
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	<b>Persentase peningkatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>80,000,000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	<b>Jumlah pelaku UMKM yang ikut pelatihan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>150 Orang</b>	<b>150,000,000</b>
Program Pengembangan UMKM	<b>Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>22.83%</b>	<b>481,502,750</b>
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	<b>Pendapatan UMKM meningkat</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>70</b>	<b>240,751,375</b>
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	<b>Jumlah peralatan yang disediakan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>37 Unit</b>	<b>240,751,375</b>



Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	<b>Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT)</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>30 Usaha Mikro</b>	<b>240,751,375</b>
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	<b>Jumlah peralatan yang disediakan</b>	<b>Kab. Kep. Selayar</b>	<b>37 Unit</b>	<b>240,751,375</b>

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya manusia yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**Tabel 2.4.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Th. 2023
1	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi birokrasi perangkat daerah	70 (B)
		Nilai SAKIP perangkat daerah	70 (BB)
		Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	sesuai
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	82 (B)
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha	Cakupan kemandirian pelaku usaha	12,75
		Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri	21,01



		Persentase Kemandirian UMK	4,50
3	Meningkatnya potensi ketersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,91
		Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar	62,5
		Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan	18
		Kecukupan Komoditas Perdagangan	100



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Selayar berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menangani 2 urusan, 1 Urusan wajib yakni Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 1 urusan pilihan yakni Urusan Perdagangan.

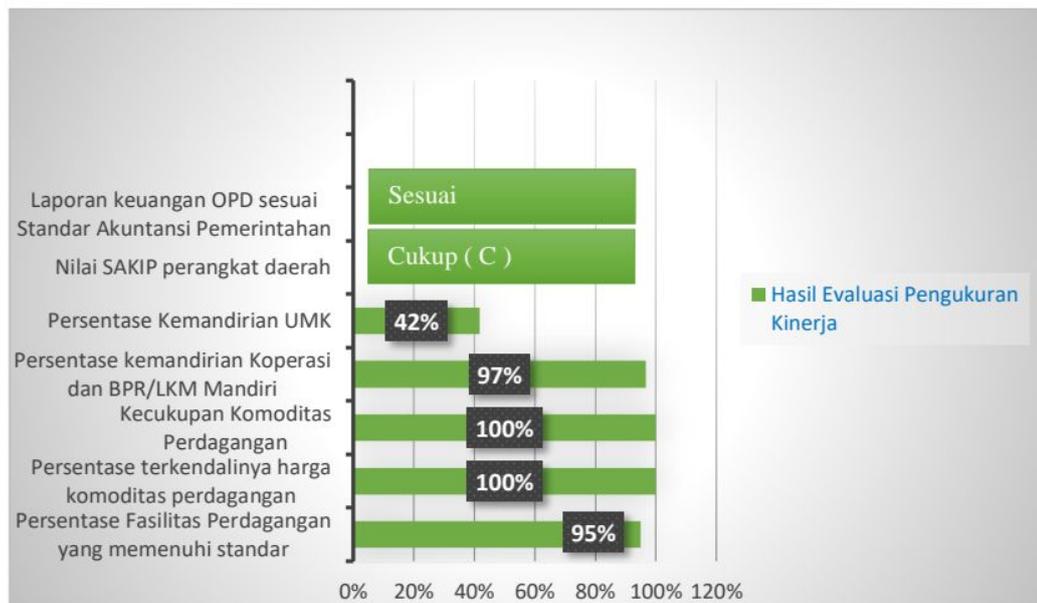
Menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan, Meningkatnya Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrologian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar, Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi, dan Meningkatnya Kualitas UMKM . Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dibutuhkan 7 Indikator Kinerja. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2023 menunjukkan indikator telah dicapai dengan hasil yang “baik”.



## A. PENGUKURAN KINERJA

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun dokumen pengukuran kinerja triwulan dan tahunan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1.**  
**Hasil terhadap pengukuran kinerja**



## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan



penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

### 1. Target dan Realisasi Kinerja

Dari Indikator-indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan rata-rata capaian realisasi di rinci pada table berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
<b>Urusan Bidang Perdagangan</b>						
I	Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan					
	a. Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar	%	62,5	59,38	95	
	b. Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan	%	18,1	18,1	100	
	c. Kecukupan Komoditas Perdagangan	%	100	100	100	
<b>Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</b>						
II.	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha					
	a. Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri	%	21,01	20,29	96,57	
	b. Persentase Kemandirian UMK	%	4,50	1,88	41,78	



III.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah					
	a. Nilai SAKP perangkat daerah	Nilai	70			
	b. Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai		

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu, dapat dilihat berdasarkan IKU Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.2.**  
**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu**

NO	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		% Capaian Kinerja	Tahun 2023		% Capaian Kinerja
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian						
	a. Pertumbuhan Sektor Industri	25 IKM	25 IKM	100			
	b. Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	51 IKM	51 IKM	100			
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kmetrologian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar						
	a. Pasar rakyat dalam kondisi baik	85%	85%	100			
	b. Jumlah rekomnedasi izin usaha yang diterbitkan	1000	1232	123,2			



	c. Persentase UTTP yang bertanda tera SAH	600 UTTP	0	0			
III.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM						
	a. Persentase Koperasi Aktif	138	137	99,27			
	b. Persentase Koperasi Sehat	150	28	18,66			
	c. Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	350 UKM	350 UKM	100			
	d. Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	45 UKM	30 UKM	66,66			

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
<b>Urusan Bidang Perdagangan</b>						
I	Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan					
	a. Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar	%	62,5	59,38	95	
	b. Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan	%	18,1	18,1	100	
	c. Kecukupan Komoditas Perdagangan	%	100	100	100	
<b>Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</b>						
II.	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha					



	a. Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri	%	21,01	20,29	96,57	
	b. Persentase Kemandirian UMK	%	4,50	1,88	41,78	
III.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah					
	a. Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	B	C		
	b. Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	-	Sesuai	Sesuai		

### 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian indikator tersebut melalui 7 indikator sampai tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

#### 3.1. Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar

Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar didukung dengan program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan output fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan, peningkatan distribusi barang/jasa dan memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha dan pihak buyer.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat) di seluruh kecamatan dengan memastikan seluruh sarana perdagangan yang telah dibangun telah dipergunakan serta memantau fasilitas yang ada agar memenuhi standar.



### 3.2. Persentase Terkendalinya Harga Komoditas Perdagangan

Pengendalian harga komoditas perdagangan di dukukung oleh Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting dengan kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten dengan realisasi capaian kinerja 100% Sehingga sepanjang tahun 2023 harga bahan pokok dan barang penting lainnya relatif stabil.



### 3.3. Kecukupan Komoditas Perdagangan.

Kecukupan Komoditas Perdagangan didukung oleh Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting dengan kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100% dimana pada tahun 2023 tidak terdapat kelangkaan komoditas perdagangan terutama bahan pokok dan barang penting lainnya.



### 3.4. Persentase Kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri.

Kemandirian koperasi dan BPR/LKM Mandiri didukung oleh tiga program yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 96,57%.

Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri di dukung dengan tiga kegiatan :

1. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output 137 koperasi
2. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dengan output 71 orang pengurus koperasi.

3. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output 50 koperasi.

Tabel 3.2.4

Jumlah koperasi dan BPR tahun 2017-2023

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koperasi aktif	131	162	136	136	137	148
2	Jumlah koperasi	161	132	165	165	167	177
3	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah BPR Aktif/LKM	1	1	1	1	1	1

### 3.5. Persentase Kemandirian UMK

Kemandirian UMK didukung oleh dua yaitu program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program pengembangan UMKM dengan realisasi capaian kinerja sebesar 41,78%.

Persentase kemandirian UMK di dukung dengan tiga kegiatan :

1. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan output 220 orang pelaku usaha.
2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan output 332 wirausaha baru.



3. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi dengan output 261 pelaku usaha.

Total Keseluruhan Jumlah Penerima Bantuan dari Tahun 2017-2022 Sebanyak 500 Kelompok, dengan Jumlah Unit Sebanyak 2.813 Unit Bantuan Peralatan.

*Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2022 Sebesar Rp. 2.245.196.000,- terdiri dari :*

Tabel 3.2.5

*Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2023 Sebesar Rp 585.000.000 terdiri dari :*

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Perlengkapan/Aksesoris Rias Pengantin	1	130
2	Pengadaan Rental Komputer	1	4
3	Pengadaan Pertukangan	3	18
4	Pengadaan Perbengkelan	1	10
5	Pengadaan Air Kemasan 2 Layer	1	1
6	Pengadaan Mesin-Mesin Parut Kelapa komplit	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>167</b>



Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2022 Sebesar Rp. 2.245.196.000,-  
terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Depot Air Minum	2	2
2	Pengadaan AMDK	1	1
3	Pengadaan Masak-memasak	11	55
4	Mesin Jahit	6	35
5	Parut Kelapan	7	36
6	Ada Pertukangan	10	70
7	Perbengkelam	8	73 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>45 Kelompok</b>	<b>132 Unit</b>

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2021 Sebesar Rp. 2.245.196.000,-  
terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Depot Air Minum	2	2 unit
2	Pengadaan Mesin Mixer Pembuat Roti	3	20 Unit
3	Pengadaan Mesin jahit	3	12 Unit
4	PengadaanMesin Obras	3	9 Unit
5	Pengadaan Mesin penggiling tepung ikan	1	1 Unit
6	Pengadaan Pertukangan	14	92 unit
7	Pengadaan Mesin Sentri Fugar	4	4 Unit
8	Pengadaan Mesin penggiling Mie	9	27 Unit
9	Pengadaan Mesin Pemeras kelapa	9	9 Unit
10	Pengadaan mesin gula Merah	4	4Unit
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>180 Unit</b>

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2019 Sebesar Rp.1.258.575.000,-  
terdiri dari ini:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Perajang Keripik	15 Kelompok	105 Unit
2	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	12 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Mesin Pencetak Batu Merah	5 Kelompok	5 Unit
4	Pengadaan Alat Pertukangan	17 Kelompok	119 Unit
5	Pengadaan Alat Masak Memasak	25 Kelompok	550 Unit
6	Pengadaan Pengupas Sabut Kelapa	5 Kelompok	5 Unit
7	Pengadaan Mesin Parut Kelapa Dan Penepung Beras	11 Kelompok	55 Unit
8	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Dan Mesin Press Sampah	1 Kelompok	2 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>91 Kelompok</b>	<b>901 Unit</b>

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.997.459.250,-  
terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Parut Kelapa	22 Kelompok	67 Unit
2	Pengadaan Alat Pengelolaan Ikan	20 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Alat Pertukangan	22 Kelompok	22 Unit
4	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	37 Kelompok	40 Unit
5	Pengadaan Oven Kue	20 Kelompok	20 Unit
6	Pengadaan Alat Vacuum Pres	32 Kelompok	94 Unit
7	Pengadaan Alat Pemecah Kulit Kemiri	11 Kelompok	11 Unit
8	Pengadaan Mesin Pengering	12 Kelompok	12 Unit
9	Pengadaan Mesin Press Emping	16 Kelompok	16 Unit
10	Pengadaan Alat Kerajinan	17 Kelompok	272 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>209 Kelompok</b>	<b>614 Unit</b>

*Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2017 Sebesar Rp. 1.506.772.250,-  
terdiri dari :*

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Peralatan Masak Memasak	23 Kelompok	427 Unit
2	Pengadaan Mesin Spinner	22 Kelompok	73 Unit
3	Pengadaan Mesin Penggiling Daging	15 Kelompok	30 Unit
4	Pengadaan Mesin Pembuat Roti	22 Kelompok	20 Unit
5	Pengadaan Alat Kacip	21 Kelompok	96 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>103 Kelompok</b>	<b>217 Unit</b>

### 3.6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 diperoleh nilai sebesar 54,25 dengan kategori CC (Cukup), Tahun 2022 meningkat menjadi 58,27 dengan kategori C (Cukup) dan Tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai nilai B (Baik).

### 3.7. Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Daerah

Laporan keuangan OPD yang meliputi tehnik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan -LO, beban, pendapatan-LRA, belanja asset, kewajiban, ekuitas penyesuaian dan koreksi serta penyusunan Laporan keuangan OPD telah sesuai dengan standar akuntansi daerah.



#### 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi dan realisasi anggaran, rasio ekonomi, capaian kinerja keluaran dan rasio efisiensi dari masing-masing Urusan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	Rasio Ekonomi %	Capaian Kinerja %	Keterangan
<b>Urusan Bidang Perdagangan</b>						
I	Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan					
	a. Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar	-	-	-	95	
	b. Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan	800.000.000	777.421.000	97,17	100	
	c. Kecukupan Komoditas Perdagangan	54.980.000	54.876.000	99,81	100	
<b>Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</b>						
II.	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha					
	a. Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri	380.640.000	378.465.000	99,42	96,57	
	b. Persentase Kemandirian UMK	796.730.000	795.387.350	99,83	41,78	
III.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah					
	a. Nilai SAKIP perangkat daerah	9.930.000	9.930.000	100	-	Belum Di Review
	b. Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	4.020.000	4.020.000	100	Sesuai	



### C. REALISASI KEUANGAN

Dana yang dianggarkan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penyelenggaraan kegiatan berasal dari APBD tahun 2023, dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 7.923.708.000 Terealisasi sebesar Rp. 7.498.021.598,- atau 94,63% dengan sisa anggaran sebesar Rp.425.686.402,-.

Tabel 3.3.1  
Realisasi Keuangan Tahun 2023

NO	Nama Program dan Kegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%
1	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase koperasi sehat</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	100
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi percontohan	25,000,000	25,000,000	100
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenanga Kabupaten/Kota Kinerja	25,000,000	25,000,000	100
2	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan (%)</b>	<b>155,640,000</b>	<b>153,465,000</b>	99
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	155,640,000	153,465,000	99
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	155,640,000	153,465,000	99
3	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi yang Diberdayakan</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	100



			dan mendapatkan perlindungan(%)			
		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100</b>
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	200,000,000	200,000,000	100
4		<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	Persentase UMKM yang Diberdayakan	<b>796,730,000</b>	<b>795,387,350</b>	<b>100</b>
		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Pendapatan UMKM meningkat</b>	<b>796,730,000</b>	<b>795,387,350</b>	<b>100</b>
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	445,000,000	444,732,350	100
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	351,730,000	350,655,000	100
5		<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>585,000,000</b>	<b>225,110,900</b>	<b>38</b>
		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<b>jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT)</b>	<b>585,000,000</b>	<b>225,110,900</b>	<b>38</b>
		Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	585,000,000	512,148,700	88

			Teknologi (Unit Usaha)			
6	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>5,256,358,000</b>	<b>4,931,839,988</b>	<b>94</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun</b>	<b>45,368,900</b>	<b>45,274,900</b>	<b>100</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	6,580,000	6,516,000	99
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	5,000,000	5,000,000	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	3,590,000	3,590,000	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA)	5,000,000	5,000,000	100
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	5,268,900	5,238,900	99
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPPD, Buku Profil)	10,000,000	10,000,000	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK)	9,930,000	9,930,000	100
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2,611,484,700</b>	<b>2,524,872,024</b>	<b>97</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	2,598,550,000	2,512,187,724	97
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	4,020,000	4,020,000	100



		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah SPJ Fungsional	5,264,300	5,014,300	95
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RF-K	3,650,000	3,650,000	100
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun</b>	<b>7,949,800</b>	<b>7,949,800</b>	100
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3,450,000	3,450,000	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4,499,800	4,499,800	100
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>9,010,000</b>	<b>9,010,000</b>	100
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5,220,000	5,220,000	100
		Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3,790,000	3,790,000	100
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran</b>	<b>1,086,508,100</b>	<b>1,086,494,100</b>	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	181,361,000	181,347,000	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan (spanduk) yang tersedia	135,202,100	135,202,100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Perindag KUKM yang tersusun	769,945,000	769,945,000	100
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan</b>	<b>382,830,000</b>	<b>382,830,000</b>	100

			<b>Operasional Perkantoran</b>			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30,000,000	30,000,000	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	352,830,000	352,830,000	100
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran</b>	<b>604,896,600</b>	<b>570,565,524</b>	94
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,760,000	6,760,000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	153,335,000	153,103,124	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	444,801,600	410,702,400	92
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah</b>	<b>508,309,900</b>	<b>307,780,900</b>	61
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	141,510,000	140,933,000	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33,500,000	33,500,000	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	108,300,000	108,300,000	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	224,999,900	25,047,900	11

7	<b>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting</b>		Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)	854,980,000	832,297,000	97
	<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan</b>	854,980,000	832,297,000	97
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	54,980,000	54,876,000	100
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) kabupaten/Kota	800,000,000	777,421,000	97
8	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>		<b>Persentase alat ukur yang ditera</b>	50,000,000	45,030,300	90
	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		<b>Alat UTTP bertanda tera SAH yang berlaku</b>	50,000,000	45,030,300	90
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	25,000,000	20,360,900	81
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Lega	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	25,000,000	24,669,400	99

Secara umum anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari tiga sumber yaitu APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kontribusi pendapatan dibidang Perdagangan melalui retribusi pasar dan layanan tera/tera ulang.



## 1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.3.2

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No	Sumber	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Reribusi Pelayanan Pasar	518.000.000	236.152.800	45,59
2.	Layanan Tera/Tera Ulang	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>518.000.000</b>	<b>236.152.800</b>	<b>45,59</b>

## 2. Belanja

Tabel 3.3.3

Rekapitulasi Belanja Tahun 2023

Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
Belanja Operasi	7.540.878.000	7.115.191.598	425.686.402	94,35
Belanja Modal	382.830.000	382.830.000	-	100
<b>Surplus/(defisit)</b>	<b>20.048.534.875</b>	<b>19.680.074.270</b>	<b>368.460.605</b>	<b>98,16</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hal-hal yang telah terurai melalui bab-bab diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan program dapat dicapai dengan baik walaupun masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya dengan keterbatasan waktu, keterlambatan dalam pencairan keuangan serta untuk pembinaan diwilayah kepulauan terhambat masalah cuaca yang kurang mendukung. Pemecahan dari permasalahan dan kendala perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang agar pelaksanaan dapat lebih baik dari segi waktu, realisasi dan capaian kinerja yang akuntabel.

Selanjutnya masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan laporan ini dapat tercapai dengan lebih baik dan untuk menjadi perbaikan dimasa yang akan datang semoga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab dapat dicapai.

\*\*\*



## **LAMPIRAN**

- **Perjanjian Kinerja Tahun 2024**



